

## DIY DUKUNG MIGRASI TV DIGITAL PADA 2022

### Literasi dan Kesiapan Jadi Kunci Utama Digitalisasi Penyiaran



**Rony Primanto Hari**  
Kepala Diskominfo DIY

DIGITALISASI adalah suatu kencanaan, salah satunya digitalisasi industri penyiaran televisi di tanah air. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 72 angka 8 yang mengamanatkan migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke digital dan penghentian siaran televisi analog (ASO) paling lambat pada 2 November 2022.

Program transformasi digital nasional yang akan dilakukan bertahap ini dinilai akan menegatkan industri telekomunikasi dan penyiaran sekaligus optimalisasi sumber daya terbatas seperti spektrum frekuensi radio. Namun dibutuhkan persiapan matang dan terencana dan literasi publik menyambut alih teknologi siaran analog ke digital pada 2022 harus dilakukan secara serius. Pasalnya, salah satu instru-

men yang paling berdampak dari alih teknologi ini selain kalangan industri adalah masyarakat terutama mereka yang tidak mampu secara ekonomi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY Ir Rony Primanto Hari MT mengatakan pihaknya telah mengadakan persiapan seperti mengadakan berbagai macam sosialisasi baik kepada media penyiaran maupun masyarakat DIY tentang keberadaan dan migrasi TV digital tersebut. Pemerintah telah menetapkan penyelenggara multiplexser (mux) yaitu Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan beberapa televisi swasta yang akan menampung televisi lokal bermigrasi dari siaran TV analog ke TV digital.

"Saya kira bagi perusahaan atau lembaga penyiaran di tanah air sudah mengarah ke TV Digital saat ini, hanya saja berbagai perangkat yang dimiliki perlu dirubah dari analog ke model digital. Ada dua mux yang disediakan di DIY yaitu TVRI dan Metro TV yang masing-masing akan menampung 12 TV digital. Kurang lebih sudah ada 20 saluran TV digital yang terdaftar di DIY dan dalam taraf uji coba saat ini, jadi masih ada sisa 4 saluran TV digital yang belum terisi," paparnya kepada KR, Minggu (18/4).

Rony menekankan keha-

diran saluran TV digital ini diharapkan agar lembaga penyiaran televisi di daerah bisa lebih berperan terhadap daerahnya sendiri, khususnya ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya. Sehingga kepemilikan saluran TV digital di DIY dimiliki dan diproduksi oleh masyarakat DIY yang dapat dinikmati masyarakat luas. Pihaknya masih dalam tahapan sosialisasi dan diseminasi terkait migrasi TV digital tersebut.

"Beberapa saluran TV digital yang telah terdaftar resmi di DIY ini sudah memulai ujicoba saat ini karena harus bermigrasi semuanya pada Agustus 2022. Semua lembaga penyiaran televisi di DIY harus siap berpindah dari TV analog ke TV digital kalau tidak akan ketinggalan, apalagi TV analog sudah tidak bisa digunakan tahun depan," tandasnya.

Diskominfo DIY dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY bersama-sama melakukan sosialisasi baik kepada masyarakat maupun lembaga penyiaran khususnya media penyiaran lokal sehingga diharapkan sudah siap bermigrasi dari TV analog ke TV digital pada Agustus 2022 mendatang. Pihaknya juga diminta melakukan penyesuaian Set Top Box (STB) dari TV analog menjadi TV digital gratis kepada masyarakat, khusus-

nya yang kurang mampu dan membutuhkan seperti mekanisme program bantuan sosial." Kira-kira akan ada 10.000 hingga 100 ribu STB yang akan dibagikan bagi masyarakat kurang mampu atau yang membutuhkan di DIY," imbuh Rony.

Menurutnya dengan semakin banyaknya lembaga penyiaran TV digital di DIY ini akan semakin mengangakat nilai-nilai keistimewaan DIY, menyiarkan siaran dengan bahasa lokal, menggunakan produksi dan sumber daya manusia (SDM) lokal sehingga bisa menghidupkan sineman/budayaan maupun pelaku usaha lokal dan lainnya. Terlebih TV digital ini gambarnya akan lebih bersih tidak tergantung cuaca seperti TV Analog, suara lebih jernih dan kanalnya menjadi lebih banyak karena canggih teknologinya.

"Kanal saluran televisi yang ada di DIY baru ada 12 saluran bisa bertambah menjadi 24 saluran televisi setelah bermigrasi ke digital kedepannya. TV Digital ini berbeda dengan TV streaming menggunakan gawai maupun TV kabel atau satelit berlangganan, TV digital menggunakan jaringan televisi terestrial free to air hanya salurannya ditangkap dengan sistem digital. Yang jelas dengan semakin banyaknya lembaga penyiaran di DIY maka edukasi yang di-



Ilustrasi sosialisasi migrasi siaran televisi digital kepada masyarakat

KR-Fira Nurfiyani

sampaikan ke masyarakat menjadi lebih baik," terangnya.

Ketua KPID DIY Dewi Nurhasanah Sth I MA menyampaikan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan KPID DIY telah memikirkan kesiapan baik dari masyarakat maupun lembaga penyiaran khususnya lokal dalam bermigrasi dari TV analog ke TV digital. Undang-Undang Cipta Kerja telah diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran Pasal 85, Pemerintah membantu penyediaan alat bantu penerimaan siaran STB kepada rumah tangga miskin agar dapat menerima siaran televisi secara digital melalui terestrial.

"Itu adalah kesiapan mutlak yang harus dipenuhi, karena masyarakat tidak bisa mengakses siaran TV di-

gital jika tidak ada alat STB tersebut. Sebab tidak semua masyarakat mampu membeli alat tersebut khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah atau rumah tangga miskin sehingga pemerintah perlu hadir disini. Mekanisme implementasi dari PP 46 Tahun 2021 tersebut masih belum ada eksekusinya sehingga pihaknya masih menunggu keputusan menteri terkait," ungkapnya.

Dewi menyoroti nasib televisi lokal agar tetap bisa melakukan siaran dan kesiapan publik atau masyarakat DIY menerima migrasi ke TV digital tersebut. Media penyiaran lokal yang masih eksisting membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit untuk bermigrasi, maka pemerintah diharapkan bisa memberikan kebijakan atau perhatian semacam tarif khusus sewa mux yang terjang-

kau dan logis agar tetap bisa bertahan dan eksis. KPID DIY berusaha meningkatkan literasi media kepada masyarakat dan memberikan pembinaan kepada televisi lokal agar bisa beradaptasi dan mengakses seluruh kebutuhan berkaitan migrasi analog ke digital.

"Literasi publik juga harus diperhatikan, masyarakat harus diberikan edukasi karena konsekuensi dari digitalisasi yang tidak bisa dibendung adalah masyarakat akan diserbu informasi dari berbagai media penyiaran yang ada di DIY sehingga mereka perlu disiapkan mental dan literasinya menerima TV digital. Yang paling menjadi perhatian KPID DIY adalah nasib dari lembaga penyiaran eksisting lokal di daerah dan kesiapan publik menerima migrasi ke digital," pungkasnya. (Ira)

## POLRES GUNUNGKIDUL

# Bubarkan Aksi Balap Liar di Jalan Umum

**WONOSARI (KR)** - Polres Gunungkidul mengencarkan patroli mengantisipasi maraknya balap motor liar di sejumlah ruas jalan. Terdapat 5 unit sepeda motor beserta pengendaranya diamankan Polres Gunungkidul karena kedapatan melakukan aksi balapan motor di jalam umum.

Kasubag Humas Polres Gunungkidul, Iptu Suryanto mengatakan saat melakukan patroli kepolisian mendapat informasi adanya aksi balap liar oleh sekelompok pemuda di Jalan Wareng, Kapanewon Wonosari dan langsung menuju lokasi. "Kami langsung melakukan pen-



KR-Bambang Purwanto

Razia balap liar di Gunungkidul.

## Pemudik Wajib Tunjukkan Rapid Test Antigen

**WATES (KR)** - Kulonprogo menerapkan aturan ketat terhadap masyarakat yang ingin mudik pada musim liburan Idul Fitri 1442 H.

Salah satunya wajib menunjukkan bukti rapid test antigen kepada gugus tugas di tingkat kalurahan.

"Aturan tersebut sebagai upaya mencegah peningkatan kasus penularan saat tradisi mudik Lebaran. Apabila bukti rapid antigen dari daerah asal sudah tidak berlaku maka pemudik akan diminta tes ulang di Kulonprogo," kata Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kulonprogo Fajar Gegana, Sabtu (17/4).

Bukti rapid test antigen untuk syarat perjalanan hanya berlaku 2 x 24 jam.

"Jadi bukti test rapid antigen dengan hasil non reaktif ini memang sudah menjadi syarat wajib ketika mudik ke Kulonprogo. Kami akan memberikan surat edaran ke gugus tugas tingkat kalurahan terkait aturan tersebut," ujar Fajar Gegana.

Wakil Bupati (Wabup)

cegatan dan mengamankan lima pengendar berikot motor milik mereka," katanya Minggu (18/4).

Kedatangan polisi, membuat para pemuda tersebut berusaha membubarkan diri bahkan ada yang sempat terjadi sempet antar pengendara. Bahkan seorang

anggota polisi yang saat itu bermaksud menolong, namun justru tertabrak dan mengalami luka lecet.

Ada 5 pemotor yang diamankan oleh petugas untuk digiring ke Mapolres Gunungkidul. Adapun setelah dilakukan pembinaan, juga penindakan dibuktikan dengan bukti pelanggaran (Tilang) karena ke 5 motor yang digunakan tidak sesuai dengan standar sepeda motor, mereka diminta pulang. "Pembinaan juga melibatkan orangtuanya masing-masing," ucapnya.

Terkait dengan balapan motor liar, pihak kepolisian berkomitmen untuk menindak tegas bagi pelakunya. Pasalnya ajang semacam ini sangat berba-

kerja-sama dengan TNI, Polri dan Dinas Perhubungan untuk pengawasan posko perbatasan itu.

"Sumber Daya Manusia di Dinas Perhubungan Kulonprogo memang sangat terbatas. Sehingga kami perlu bantuan TNI dan Polri untuk penjagaan di wilayah perbatasan," jelasnya. (Rul)-

haya, mengganggu dan meresahkan masyarakat setempat. Tindakan tegas ini dimaksudkan agar

para pelaku balap liar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Beberapa ruas jalan juga

sudah dipetakan dan dijadikan target polisi. "Kami mohon masyarakat untuk ikut berpartisipasi, jika me-

ngetahui ada balapan liar agar dilaporkan ke Polsek atau Polres Gunungkidul," tutupnya. (Bmp)-f

## ANGGOTA DPR RI DRS HM GANDUNG PARDIMAN MM

# Desak Tinjau PP No 57 Tahun 2021 yang Hilangkan Pancasila dan Bahasa Indonesia

**YOGYA (KR)** - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar daerah pemilihan DIY Drs HM Gandung Pardiman MM mempertanyakan isi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang salah satunya menghilangkan Pancasila dan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Padahal dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan bahasa Indonesia.

"Itu sudah jelas diatur dalam undang-undang, namun mengapa dalam peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, Pancasila dan Bahasa Indonesia dihilangkan. Saya khawatir ada tangan-tangan jahat berideologi ekstrem kanan maupun ekstrim kiri (komunis) yang berada di dalam pemerintahan berupaya menghilangkan Pancasila yang jelas sebagai ideologi dan dasar negara Bangsa Indonesia. Saya yakin Presiden Joko Widodo tidak memerintahkan dihilangkannya mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia," tegas Gandung Pardiman saat jumpa pers di Kantor DPD Partai Golkar DIY, Jalan Jenderal Sudirman, Sabtu (17/4). Sebelumnya di tempat yang sama Gandung Pardiman menggelar rapat bersama Anggota Fraksi Partai Golkar se-DIY membahas masalah ini.

Lebih lanjut Gandung Pardiman menyatakan, Pancasila dan Bahasa Indonesia adalah jati diri Bangsa dan Negara Indonesia, tapi mengapa dua mata kuliah yang sangat fundamental ini dihilangkan. "Kita sebagai warga negara harus berani mengingatkan Pemerintah.



KR-Devid Permana

Drs HM Gandung Pardiman MM menyampaikan keterangan pers.

Kalau hal ini dibiarkan maka upaya merongrong Pancasila akan semakin berani dan Pancasila akan hilang dari bumi Indonesia. Hal ini tidak boleh dibiarkan. Kami sebagai kader Partai Golkar, partai yang menyatakan diri sebagai benteng Pancasila sangat menyangkan dan meminta kepada Pemerintah untuk meninjau ulang Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional," ujar anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.

Sebagai anggota DPR/MPR RI, selama ini Gandung Pardiman terus menyosialisasikan program Empat Pilar kepada masyarakat yang isinya tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai ideologi negara, Pancasila telah dilahirkan dan dibentuk oleh para pendiri bangsa ini dengan tujuan yang sudah sangat jelas, yaitu sebagai rohnya bangsa Indonesia.

"Para pendiri bangsa dan Negara Indonesia tentu sangat kecewa jika melihat kenyataan adanya PP No 57 Tahun 2021 ini. Jika kita baca dengan cermat serta dipahami

dari sila kesatu sampai dengan sila kelima sudah sangat jelas, Pancasila adalah sebagai pengikat dan alat pemersatu bangsa terdiri dari berbagai keanekaragaman suku bangsa dan agama di Indonesia. Penyusunan sila-sila dalam Pancasila ini melalui perdebatan yang panjang dari para pendiri bangsa. Apa alasannya Pancasila dihilangkan dari Standar Pendidikan Nasional," ungkap Politisi Senior Partai Golkar yang juga Ketua DPD Partai Golkar DIY ini.

Seperti telah diberitakan, Peraturan Pemerintah tersebut ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 30 Maret 2021 dan diundangkan oleh Menkumham Yasonna Laoly pada 31 Maret 2021. PP ini menjelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan digunakan oleh pemerintah untuk jalur pendidikan formal hingga nonformal. "Standar Nasional Pendidikan digunakan pada pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat pada Jalur Pendidikan formal, Jalur Pendidikan nonformal, dan Jalur Pendidikan informal," demikian bunyi Pasal 2 ayat

(1). Di Pasal 40 ayat (3), PP ini menghilangkan Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam standar nasional pendidikan pada kurikulum pendidikan tinggi. Padahal dalam UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pancasila dan bahasa Indonesia masuk dalam kurikulum pendidikan tinggi. "Sebagai warga negara yang sekaligus sebagai wakil rakyat, kami akan terus bersuara keras meminta kepada Pemerintah untuk meninjau ulang Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tersebut," kata Gandung yang memiliki slogan Ikhlas Berjuang Ikhlas Beramal Peduli Semuanya.

Gandung menilai hal ini sebagai suatu tragedi yang patut ditelusuri, apakah ini memang sengaja secara konseptual atau sebuah ketelodoran atau ketololan dari seorang menteri. "Ini betul-betul tragedi, ada seorang Menteri yang akan menghancurkan bangsa dan negara. Seorang menteri yang tidak tahu dan tidak menghormati sejarah bangsanya. Menteri seperti ini layak dan patut diganti," pungkas Gandung Pardiman. (Dev)-f



Drs HM Gandung Pardiman MM berdiskusi bersama Anggota Fraksi Partai Golkar.



Sekretaris DPD Partai Golkar DIY Erwin Nizar membacakan pernyataan sikap.